

Persepsi Guru dan Kepala Sekolah tentang Penanaman *Ecological Citizenship* dalam Membentuk *Civic Disposition* Siswa SD**Meilana Umi Anshory, Triyanto, Deni Zein Tarsidi**Universitas Sebelas Maret
try@staff.uns.ac.id**Article History**

accepted 1/7/2026

approved 1/8/2026

published 26/8/2026

Abstract

This study was motivated by the worsening ecological crisis and the importance of fostering civic character starting in elementary school. The purpose of this study is to analyze the perceptions of teachers and school principals regarding the cultivation of ecological citizenship in shaping the civic dispositions of elementary school students. The study employs a phenomenological qualitative approach using in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. This multisite qualitative case study involved three school principals and four fourth-grade teachers at three public elementary schools in Sragen Regency. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis, and were then analyzed thematically. The findings indicate that elementary school students' civic dispositions are still in a transitional (developing) stage and are highly dependent on external stimuli. Five inhibiting factors were identified, including the short duration of interventions and a punishment-based disciplinary approach. The study's conclusion emphasizes that collaboration between teachers and school principals in creating an ecological school culture is crucial to the success of fostering students' civic dispositions from an early age.

Keywords: Civic disposition, ecological citizenship, elementary school, teacher perceptions, principal leadership

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh krisis ekologis yang semakin parah dan pentingnya membentuk karakter kewarganegaraan sejak usia SD. Tujuan penelitian adalah menganalisis persepsi guru dan kepala sekolah tentang penanaman *ecological citizenship* dalam membentuk *civic disposition* siswa SD. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Studi kasus kualitatif *multisite* ini melibatkan tiga kepala sekolah dan empat guru kelas IV di tiga SD Negeri Kabupaten Sragen. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, lalu dianalisis secara tematik. Temuan menunjukkan bahwa *civic disposition* siswa SD masih berada pada tahap transisi (*developing*) dan sangat bergantung pada stimulus eksternal. Lima faktor penghambat diidentifikasi, antara lain durasi intervensi singkat dan pendekatan disiplin berbasis hukuman. Simpulan penelitian menegaskan bahwa kolaborasi antara guru dan kepala sekolah dalam menciptakan budaya sekolah ekologis sangat menentukan keberhasilan pembentukan watak kewarganegaraan siswa sejak dini.

Kata kunci: *civic disposition*, *ecological citizenship*, SD, persepsi guru, kepemimpinan kepala sekolah.



PENDAHULUAN

Krisis ekologi global telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan Indonesia mengalami deforestasi 261.575 hektar pada tahun 2024 dan lebih dari 3.500 bencana ekologis per tahun (Auriga Nusantara, 2026; BNPB, 2023). Anak-anak usia SD adalah kelompok paling rentan terhadap dampak krisis ini dan akan mewarisi konsekuensi jangka panjang dari kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini. Kondisi ini menuntut dunia pendidikan untuk tidak sekadar mentransfer pengetahuan, tetapi secara aktif membentuk generasi yang memiliki kesadaran ekologis, tanggung jawab lingkungan, dan komitmen untuk bertindak demi keberlanjutan bumi. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di SD memiliki tanggung jawab fundamental dalam membentuk karakter siswa tidak hanya sebagai warga negara yang baik (*good citizen*), tetapi juga sebagai individu yang peduli terhadap kelestarian lingkungan (Jusniar Dwiputri et al., 2025). Tugas guru dan kepala sekolah dalam konteks ini sangat berat karena mereka tidak hanya dituntut untuk mentransfer pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), tetapi juga menumbuhkan keterampilan (*civic skills*) dan watak kewarganegaraan (*civic disposition*) yang berkelanjutan (Amini et al., 2022). Kepala sekolah memegang peranan kunci sebagai pemimpin transformasional yang visioner, yang mampu mendorong perilaku kewarganegaraan organisasional (*Organizational Citizenship Behavior*) di kalangan guru, sehingga tercipta budaya sekolah yang mendukung nilai-nilai ekologis (Feriandi et al., 2021). Pendidikan Kewarganegaraan di SD memiliki peran fundamental dalam membentuk karakter warga negara muda. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai penelitian, PPKn di SD berfungsi sebagai wahana utama untuk menanamkan nilai-nilai moral, sosial, dan kesadaran akan hak serta kewajiban sebagai warga negara (Anshory, dkk. 2025). Pada tahap ini, anak-anak berada dalam periode emas pembentukan kepribadian, sehingga internalisasi nilai-nilai kewarganegaraan menjadi sangat krusial untuk membangun fondasi karakter yang kokoh.

Civic disposition merujuk pada komitmen internal dan keyakinan yang mendorong seseorang untuk bertindak demi kebaikan bersama, termasuk tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap hak orang lain serta lingkungan (Sembiring et al., 2024). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa persepsi guru terhadap *ecological citizenship* sangat bervariasi; meskipun guru sepakat tentang pentingnya empati dan tanggung jawab sosial, seringkali terdapat inkonsistensi dalam pemahaman mengenai hubungan antara manusia dan alam atau pengetahuan ekologis yang mendalam (Hulu & Bawamenewi, 2022). Perspektif dari para praktisi antara guru dan kepala sekolah menjadi sangat krusial karena merekalah yang berhadapan langsung dengan tantangan implementasi di lapangan (Pratama et al., 2023). Sebuah studi internasional bahkan menekankan bahwa keberhasilan pendidikan lingkungan hidup untuk membangun *citizenship* sangat tergantung pada pendekatan *whole-school* dan dukungan penuh dari kepemimpinan sekolah, bukan hanya pada pembelajaran berbasis inkuiri di dalam kelas (Komalasari, 2009). Konsep *Ecological Citizenship* atau kewarganegaraan ekologis muncul sebagai respons terhadap tantangan lingkungan yang bersifat lintas batas dan lintas generasi. Berbeda dengan kewarganegaraan tradisional yang terikat pada wilayah negara-bangsa, *ecological citizenship* menekankan tanggung jawab etis setiap individu terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Konsep ini mendorong tindakan yang melampaui kepentingan pribadi, diwujudkan melalui gaya hidup sadar lingkungan, pengurangan jejak karbon, dan partisipasi dalam aksi pelestarian lingkungan (Dobson 2007). Pembentukan *civic disposition* sejak dini menjadi langkah utama untuk membentuk warga negara yang baik, yang tidak hanya memiliki pengetahuan kewarganegaraan tetapi juga komitmen untuk bertindak demi kepentingan bersama. Pada jenjang SD, pembentukan *civic disposition* menjadi krusial karena anak usia 7-12 tahun berada pada tahap operasional konkret, di mana karakter terbentuk melalui keteladanan dan pembiasaan yang konsisten.

Civic disposition, atau watak kewarganegaraan, merupakan dimensi afektif yang tidak kalah pentingnya dalam pendidikan karakter. Watak ini mencakup rasa tanggung jawab, rasa hormat, integritas, kedisiplinan pribadi, dan kepedulian dasar terhadap kebaikan bersama. Pembentukan *civic disposition* sejak dini menjadi langkah utama untuk membentuk warga negara yang baik, yang tidak hanya memiliki pengetahuan kewarganegaraan tetapi juga komitmen untuk bertindak demi kepentingan bersama. Di tingkat SD, pengintegrasian *ecological citizenship* menghadapi tantangan unik. Berdasarkan temuan penelitian, capaian *ecological citizenship* pada siswa SD mencakup tiga dimensi utama yang masih berada pada tahap berkembang. Pertama, dimensi kognitif; pengetahuan siswa tentang isu lingkungan masih terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis dalam kurikulum. Narasumber ahli menyoroti bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia masih dalam kategori *minimal* dan perlu bergerak ke arah yang lebih maksimal dengan melibatkan masyarakat. Kedua, dimensi afektif; sikap kepedulian lingkungan siswa berada pada tahap pembentukan kebiasaan berbasis tindakan rutin, di mana siswa membersihkan lingkungan kelas dan sekolah secara konsisten namun tindakan tersebut masih bersifat prosedural dan kontekstual. Ketiga, dimensi psikomotorik; tindakan nyata pelestarian lingkungan telah terimplementasi dalam program terstruktur seperti piket kelas, kerja bakti, dan program SIPLAH, namun sebagian besar masih bersifat *rutinitas operasional* yang berulang secara periodik.

Anak usia 7 sampai usia 12 tahun berada pada tahap operasional konkret, di mana pembentukan karakter sangat bergantung pada keteladanan, pembiasaan yang konsisten, dan pengawasan eksternal (Piaget & D.C, 2015). Capaian *ecological citizenship* pada jenjang SD tidak diukur dari pemahaman konseptual yang rumit, melainkan dari terbentuknya kebiasaan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghemat air dan listrik, serta menunjukkan empati terhadap makhluk hidup (Dobson, 2003). Kebiasaan tersebut selaras dengan tahap perkembangan kognitif operasional konkret siswa usia 7–12 tahun. Namun, pengintegrasian *ecological citizenship* untuk mencapai capaian tersebut di tingkat SD menghadapi tantangan unik. Strategi kepala sekolah dalam penguatan *ecological citizenship* sangat menentukan, mulai dari penetapan visi misi yang berpihak pada lingkungan, penyediaan fasilitas, hingga pembentukan program unggulan seperti Adiwiyata (Sembiring et al., 2024). Pada sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada hasil kuantitatif di tingkat SMP dan SMA, atau mengukur *civic disposition* hanya melalui laporan diri (*self-report*) siswa (Saadah et al., 2023).

Masih sangat terbatas penelitian yang secara khusus mengeksplorasi perspektif guru dan kepala sekolah tentang bagaimana sebenarnya proses menumbuhkan (*nurturing*) *civic disposition* melalui program *ecological citizenship* di keseharian SD. Secara kualitatif, guru mengungkapkan bahwa kedisiplinan siswa masih sangat bergantung pada pengawasan "*pada awalnya siswa menunjukkan perilaku kondusif, akan tetapi apabila muncul salah satu siswa sebagai pemantik, karena merasa tidak diawasi maka siswa lain akan menjadi ikut-ikutan*" (Guru 3). Tanggung jawab dalam tugas juga masih memerlukan pengingat, dengan sesekali terjadi keterlambatan pengumpulan tugas. Kepala Sekolah 3 menegaskan bahwa "*kultur berani mengakui kesalahan sudah mulai tumbuh tetapi belum merata,*" yang menunjukkan bahwa internalisasi nilai *civic disposition* belum konsisten lintas siswa. Pada tahap ini, anak-anak mengembangkan orientasi etis dan moral yang lebih stabil, serta kemampuan untuk memahami konsep keadilan, tanggung jawab, dan kebaikan bersama. Tanpa pembentukan *civic disposition* yang kuat sejak dini, upaya penanaman *ecological citizenship* melalui pendidikan berisiko kehilangan akar kulturalnya, sehingga nilai-nilai ekologis tidak terinternalisasi secara mendalam. Lebih jauh, *civic disposition* diduga menjadi faktor kunci yang menentukan sejauh mana pengetahuan dan nilai-nilai ekologis dapat diterjemahkan menjadi perilaku nyata dan peningkatan hasil belajar yang

bermakna. Penelitian yang secara khusus mengeksplorasi perspektif guru dan kepala sekolah tentang bagaimana sebenarnya proses menumbuhkan (*nurturing*) *civic disposition* melalui program *ecological citizenship* di keseharian SD masih terbatas.

Kebaruan teoretis penelitian ini terletak pada pergeseran fokus dari variabel moderator yang abstrak ke agen perubahan yang konkret di lapangan, yaitu guru dan kepala sekolah. Penelitian ini tidak lagi hanya menguji peran *civic disposition* sebagai variabel, tetapi mengeksplorasi bagaimana guru dan kepala sekolah mendeskripsikan strategi, hambatan, dan keberhasilan mereka dalam menginternalisasi nilai-nilai tersebut pada diri siswa. Pendekatan multidimensi ini memungkinkan penangkapan data yang lebih kaya tentang bagaimana watak kewarganegaraan seorang siswa dibentuk melalui kebijakan sekolah dan interaksi pedagogis di kelas, khususnya dalam konteks pembelajaran ekologis.

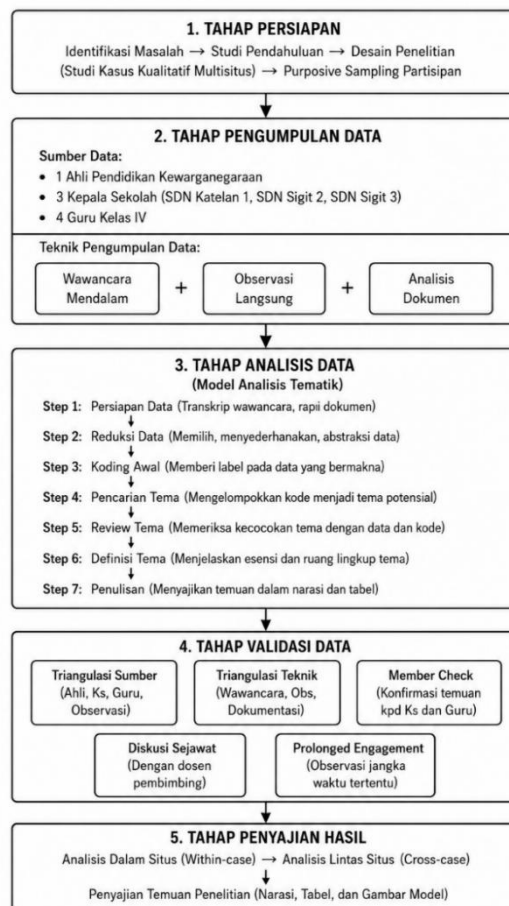
Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam perspektif guru dan kepala sekolah tentang mekanisme penumbuhan *civic disposition* melalui *ecological citizenship* di SD. Dengan menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif multisitus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dari sudut pandang pelaku tentang dinamika penguatan karakter *ecological citizenship*, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif yang berasal langsung dari pengalaman para pendidik.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Sebagai pendekatan kualitatif di mana peneliti mengeksplorasi secara mendalam sebuah sistem terbatas (*bounded system*) atau kasus jamak dalam kurun waktu tertentu, melalui pengumpulan data yang mendalam dan melibatkan berbagai sumber informasi (Creswell & Creswell, 2018). Pendekatan ini dipilih karena *civic disposition* merupakan konstruk yang tidak dapat diukur secara valid hanya melalui laporan diri sendiri. Sebagaimana diakui dalam wawancara ahli, penilaian diri sendiri dengan skala Likert tidak akan bisa menghilangkan faktor bias. Oleh karena itu, penelitian ini mengandalkan triangulasi data dari tiga sumber utama yaitu ahli, kepala sekolah, dan guru serta observasi perilaku nyata siswa di lingkungan sekolah. Triangulasi dalam penelitian kualitatif adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut (Moleong, 2017). Dalam desain ini, beberapa situs dipilih secara purposif untuk mengilustrasikan isu yang sama, yaitu peran *civic disposition* dalam *memoderasi ecological citizenship* siswa di SD. Dengan analisis dilakukan baik di dalam setiap situs (*within-case*) maupun lintas situs (*cross-case*) (Stake, 2014). Pemilihan desain ini didasarkan pada pertanyaan penelitian yang bersifat *how* dan *why*, fenomena kontemporer dalam konteks nyata, serta kebutuhan triangulasi berbagai sumber data karena *civic disposition* tidak dapat diamati secara akurat dalam waktu singkat.

Penelitian dilaksanakan di SD Negeri di wilayah Kabupaten Sragen yang dipilih secara *purposive* berdasarkan konteks kriteria sekolah Adiwiyata dan ketersediaan data pada sekolah tersebut (Baxter & Jack, 2015). Partisipan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, terdiri dari satu orang ahli Pendidikan Kewarganegaraan yang memiliki doktor di bidang PKn, tiga kepala sekolah dengan minimal dua tahun menjabat, dan empat guru kelas IV dengan minimal tiga tahun mengajar. SD Negeri yang terpilih adalah SD Negeri Katelan 1, SD Negeri Sigit 2, dan SD Negeri Sigit 3. Sumber data meliputi data primer dari wawancara mendalam dengan ahli, kepala sekolah, dan guru, serta data sekunder dokumen sekolah berupa tata tertib, program sekolah, dan observasi langsung. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dengan pertanyaan yang mengungkap dimensi *civic disposition* (tanggung jawab, kejujuran, disiplin, empati, kerja sama), observasi langsung perilaku siswa, serta analisis dokumen.

Analisis data mengacu pada model analisis tematik (Baxter & Jack, 2015). Analisis tematik memiliki tahapan: persiapan data dengan aktivitas mentranskrip wawancara dan merapikan dokumen, reduksi data yaitu memilih data yang relevan, menyederhanakan dan megabstraksikan data, kemudian koding awal dengan memberikan label pada data bagian yang bermakna, dilanjutkan pencarian tema dengan mengelompokkan kode menjadi tema potensial, langkah selanjutnya *review* tema yaitu memeriksa kecocokan tema dengan data dan kode, selanjutnya definisi tema yaitu menjelaskan esensi dan ruang lingkup, dan diakhiri tahap penulisan dengan menyajikan temuan dalam narasi dan tabel. Analisis lintas situs dilakukan untuk membandingkan temuan antar sekolah. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dengan membandingkan data dari ahli, kepala sekolah, guru, dan hasil observasi (Budiyono, 2017). Triangulasi teknik dengan menggabungkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. *Member checking* yaitu dengan mengkonfirmasi kembali temuan kepada partisipan yaitu kepala sekolah dan guru. Tahap diskusi dengan sejawat dengan melakukan diskusi temuan dengan dosen pembimbing. Diakhiri *prolonged engagement* yaitu dengan melakukan observasi dalam jangka waktu yang ditentukan. Penelitian ini mengikuti protokol etik dengan *informed consent*, kerahasiaan, anonimitas, dan hak partisipan untuk mundur (Creswell & Creswell, 2018).



Gambar 1. Desain Prosedur Penelitian Kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipan penelitian fase kualitatif dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, terdiri dari: (1) satu orang ahli Pendidikan Kewarganegaraan (dokter di bidang PKn); (2) tiga kepala sekolah dengan masa jabatan minimal dua tahun; dan (3) empat

guru kelas IV dengan pengalaman mengajar minimal tiga tahun. Sekolah yang terlibat adalah SD Negeri Katelan 1, SD Negeri Sigit 2, dan SD Negeri Sigit 3. Pemilihan partisipan didasarkan pada kriteria: (a) sekolah telah menerapkan program lingkungan (SIPLAH); (b) guru dan kepala sekolah memiliki pengalaman langsung dalam penanaman *ecological citizenship*; serta (c) kesediaan untuk berpartisipasi dalam wawancara mendalam dan observasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa guru dan kepala sekolah memiliki peran sentral dalam menumbuhkan *civic disposition* melalui program *ecological citizenship* di SD. Program *ecological citizenship* diterapkan melalui model pembelajaran *Scientific Reading Based Project* (SRBP) yang mengintegrasikan tiga komponen utama: Scientific Reading (Membaca Ilmiah); *Project-Based Learning* (Pembelajaran Berbasis Proyek); Integrasi Nilai Karakter. Guru berperan dalam tiga fungsi utama: (1) regulasi; menetapkan norma dan aturan melalui pembiasaan berjabat tangan, penggunaan bahasa Jawa *kromo inggil*, dan lagu bertema rukun; (2) fasilitasi; menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi nilai melalui proyek nyata seperti pembuatan poster edukasi, piket kelas, dan program SIPLAH; serta (3) penekanan strategis; secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam setiap tahap pembelajaran dan menjadi *role model* bagi siswa. Hanya sekitar 10-15% siswa yang mencapai tahap *Mature* (Matang), di mana perilaku internal secara penuh dan mandiri. Sementara itu, 15-20% siswa masih berada pada tahap *Emerging* (Muncul), di mana perilaku bergantung sepenuhnya pada stimulus eksternal dan pengawasan Narasumber ahli menekankan bahwa "*pendidikan yang baik adalah pendidikan yang kontinuitas antara yang ada di formal dan yang ada di masyarakat atau socio-kultural citizenship education.*" Pembahasan ini akan menguraikan secara sistematis mengapa *civic disposition* siswa SD berada pada tahap transisi (*developing*), bagaimana guru dan kepala sekolah merespons tantangan tersebut, serta implikasi pedagogis dan kebijakan yang dapat dirumuskan.

1. *Civic Disposition* pada Tahap *Developing*: Antara Ketergantungan dan Internalisasi

Temuan pertama menunjukkan bahwa perilaku bertanggung jawab dan disiplin siswa cenderung muncul hanya ketika ada pengawasan dari guru atau petugas sekolah. Hal ini mengonfirmasi teori perkembangan moral Kohlberg yang menyatakan bahwa anak usia 7-12 tahun umumnya berada pada tahap konvensional, khususnya tahap *interpersonal concordance*. Pada tahap ini, moralitas sangat ditentukan oleh keinginan untuk mendapatkan persetujuan sosial dari otoritas seperti guru dan orang tua (Nabavi & Bijandi, 2024). Senada dengan itu, Piaget menegaskan bahwa anak usia operasional konkret berada pada tahap moralitas heteronom, yaitu kepatuhan terhadap aturan masih didasarkan pada rasa hormat satu arah kepada otoritas dewasa (Piaget, 2015).

Berdasarkan temuan lapangan, guru menerapkan strategi *scaffolding moral* secara bertahap melalui tiga pendekatan konkret. Pertama, sistem pengawasan berjenjang. Guru memulai dengan pengawasan penuh pada tahap awal intervensi, kemudian secara bertahap mengurangi intensitas pengawasan seiring dengan munculnya tanda-tanda kemandirian siswa, seperti kemampuan menyelesaikan tugas tanpa diingatkan dan konsistensi perilaku baik saat diawasi maupun tidak. Guru merancang sistem pengawasan bergilir di mana ketua kelas dan pengurus kelas dilibatkan sebagai pengawas sebaya. *Kedua*, pemberian tanggung jawab bertahap. Guru memberikan tanggung jawab piket harian, kemudian meningkat ke tanggung jawab memimpin kerja bakti, hingga mengkoordinasikan program SIPLAH seiring dengan perkembangan kemampuan siswa. Pengawasan dilakukan secara bertahap, dari pengawasan penuh menuju pengawasan minimal, dengan target akhir adalah kemandirian siswa. *Ketiga*, refleksi dan umpan balik. Guru secara rutin mengadakan

diskusi kelas untuk merefleksikan perilaku, mengidentifikasi dampak tindakan terhadap lingkungan dan teman, serta merumuskan komitmen perbaikan bersama. Kegiatan ini memperkuat kesadaran internal siswa. Para guru melaporkan bahwa mereka harus secara kreatif merancang sistem pengawasan yang tidak bersifat mengekang tetapi tetap memberikan rasa aman bagi siswa. Hal ini menunjukkan bahwa guru dan kepala sekolah tidak hanya menerima keterbatasan perkembangan anak secara pasif, tetapi justru mengembangkan strategi *scaffolding* moral yang sejalan dengan konsep *Zone of Proximal Development* (ZPD) dari Vygotsky (Berkowitz, 2011). Dalam konteks ini, guru berperan sebagai *more knowledgeable other* (MKO) yang secara sistematis mengurangi bantuan eksternal seiring dengan meningkatnya internalisasi nilai oleh siswa (Christodoulou & Grace, 2025).

Namun, tantangan terbesar yang diidentifikasi adalah durasi intervensi yang hanya empat minggu. Periode ini tidak memadai untuk membawa siswa dari tahap ketergantungan eksternal (*emerging*) ke tahap internalisasi penuh (*mature*). Teori pendidikan karakter dari Lickona menegaskan bahwa internalisasi nilai-nilai karakter secara utuh membutuhkan waktu minimal enam bulan hingga satu tahun. Proses ini meliputi pembelajaran konseptual, diskusi dilema moral, pembiasaan empati, hingga internalisasi nilai secara penuh (Berkowitz, 2011). Sejalan dengan itu, guru dalam penelitian ini secara kolektif menyuarakan perlunya program jangka panjang yang terintegrasi ke dalam kurikulum, bukan sekadar proyek jangka pendek. Guru dalam penelitian ini secara kolektif menyuarakan perlunya program jangka panjang yang terintegrasi ke dalam kurikulum, bukan sekadar proyek jangka pendek.

Kepala sekolah mendukung strategi guru melalui kebijakan dan program terstruktur yang berkelanjutan. Penerapan ideal pendekatan berdiferensiasi memerlukan tiga langkah strategis. *Pertama*, asesmen diagnostik. Guru melakukan pemetaan awal tingkat *civic disposition* siswa melalui observasi perilaku sehari-hari, catatan anekdot, dan diskusi dengan orang tua. Dengan demikian, guru dapat mengelompokkan siswa dan merancang intervensi yang tepat sasaran. Implementasi dilakukan melalui "buku kendali disiplin yang wajib diisi wali murid dan berkomunikasi dengan warga sekitar sekolah bagaimana perkembangan kedisiplinan anak tersebut." *Kedua*, pemberian tanggung jawab bertingkat. Guru merancang jenjang tanggung jawab yang meningkat secara bertahap, dari tugas sederhana merapikan meja sendiri hingga tugas kompleks memimpin kerja bakti, dengan pengawasan yang disesuaikan." *Ketiga*, sistem penghargaan berbasis proses. Sebagaimana ditegaskan kepala sekolah, "penghargaan harus diberikan untuk proses dan usaha, bukan hanya untuk hasil, agar siswa dengan kemampuan awal rendah tetap termotivasi." Pendekatan ini mencerminkan *growth mindset* (Dweck, 2016) yang menekankan bahwa karakter dapat dikembangkan melalui usaha dan strategi yang tepat." Pendekatan ini mencerminkan *growth mindset* (Dweck, 2016) yang menekankan bahwa karakter dapat dikembangkan melalui usaha dan strategi yang tepat (Dweck, 2016).

Sekolah juga perlu membangun sistem dokumentasi perkembangan *civic disposition* siswa secara berkala (minimal per semester) untuk memantau pergerakan siswa antar tahap (*emerging* → *developing* → *mature*) dan mengevaluasi efektivitas intervensi SDN Sigit 2 menerapkan pendekatan restoratif dalam menangani pelanggaran, di mana siswa diajak mengidentifikasi dampak tindakannya, merancang proses perbaikan, dan belajar dari konsekuensi alami bukan sekadar dihukum. Pendekatan ini mencerminkan strategi berbasis kebajikan (*virtue-based*) yang menghasilkan komitmen internal lebih kuat dibandingkan pendekatan berbasis hukuman (*punitive*). Program ini juga mencakup kegiatan pembiasaan reflektif seperti jurnal lingkungan mingguan dan proyek aksi nyata yang melibatkan peran orang tua, sehingga pembentukan *civic disposition* berlangsung secara terstruktur, berkesinambungan, dan terukur, bukan hanya bersifat seremonial atau proyek sesaat.

2. Variabilitas Antar Siswa: Tantangan bagi Pendekatan Berdiferensiasi

Temuan kedua mengungkapkan bahwa *civic disposition* belum terdistribusi secara merata di antara para siswa. Beberapa siswa telah menunjukkan komitmen internal yang kuat, sementara yang lain masih sangat bergantung pada hadiah dan hukuman. Variabilitas ini bukanlah kelemahan, melainkan cerminan realitas perkembangan anak yang dipengaruhi oleh perbedaan pengalaman sosialisasi, pola asuh orang tua, serta karakteristik temperamental masing-masing individu (Abduloh, 2018).

Dari perspektif guru dan kepala sekolah, temuan ini mengandung implikasi pedagogis yang sangat penting. Guru tidak dapat menerapkan pendekatan yang seragam (*one-size-fits-all*) untuk seluruh kelas. Pendekatan yang tepat adalah pendekatan berdiferensiasi (*differentiated approach*) yang disesuaikan dengan tiga tingkat *civic disposition* siswa, yaitu tinggi, sedang, dan rendah (Pangalila, 2017). Penerapan idealnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagi siswa dengan *civic disposition* tinggi, guru memberikan otonomi lebih besar, peran sebagai *peer model* atau mentor bagi teman sekelas, serta tantangan kepemimpinan lingkungan yang lebih kompleks.
- b. Bagi siswa dengan *civic disposition* sedang, guru memberikan bimbingan terstruktur melalui kegiatan kolaboratif dalam kelompok heterogen, dengan pengawasan yang dikurangi secara bertahap serta umpan balik yang bersifat membangun,
- c. Bagi siswa dengan *civic disposition* rendah, guru memberikan bimbingan eksternal yang lebih intensif, penguatan positif yang konsisten, intervensi personal, serta pemecahan tugas menjadi langkah-langkah sederhana yang mudah dipahami (Pertiwi & Samsuri, 2017).

Hal ini sejalan dengan teori social learning Bandura, siswa belajar melalui observasi terhadap model yang sebaya dan dihormati (Nabavi & Bijandi, 2024). Berdasarkan temuan lapangan, pendekatan ideal yang harus dilakukan adalah pendekatan berdiferensiasi (*differentiated approach*) yang disesuaikan dengan tiga pola tingkat *civic disposition* siswa. Untuk siswa dengan *civic disposition* tinggi sekitar 10-15% siswa pada tahap *mature*, guru memberikan otonomi lebih besar dengan menugaskan mereka sebagai *peer model* atau mentor, melibatkan dalam perencanaan kegiatan lingkungan, dan memberi kepercayaan memimpin proyek. Siswa dengan *civic disposition* tinggi dapat diberi peran sebagai ketua regu piket atau koordinator program SIPLAH. Untuk siswa dengan *civic disposition* sedang (mayoritas 60-70% siswa pada tahap *developing*), guru menerapkan *scaffolding* dengan memberikan tanggung jawab yang semakin meningkat secara bertahap, disertai pengawasan yang dikurangi perlahan, serta umpan balik yang membangun. Siswa pada tahap ini "terbiasa menyelesaikan dan mengumpulkan tugas pelajaran tepat waktu... dan cenderung dapat menerima segala konsekuensi atas kesalahan sendiri." Siswa dengan *civic disposition rendah* (15-20% siswa pada tahap *emerging*), guru memberikan bimbingan eksternal yang lebih intensif, penguatan positif yang konsisten, intervensi personal, serta pendampingan individual dalam mengembangkan kebiasaan bertanggung jawab.

Kepala sekolah dalam penelitian ini juga menyoroti pentingnya sistem penghargaan yang tidak bersifat kompetitif destruktif. Sebagaimana ditegaskan oleh salah satu kepala sekolah, "*penghargaan harus diberikan untuk proses dan usaha, bukan hanya untuk hasil, agar siswa dengan kemampuan awal rendah tetap termotivasi.*" Pendekatan ini mencerminkan *growth mindset* (Dweck) yang menekankan bahwa karakter dapat dikembangkan melalui usaha dan strategi yang tepat, bukan bersifat tetap (*fixed*) (Dweck, 2016).

3. Kesenambungan Tri Pusat Pendidikan: Sekolah Tidak Bisa Bekerja Sendiri

Temuan keempat mengenai tidak adanya kesinambungan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat merupakan salah satu faktor penghambat paling signifikan yang diidentifikasi oleh para guru dan kepala sekolah (Anisafitri, 2021). Seorang ahli yang diwawancarai mengutip pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa "pendidikan karakter tidak akan pernah optimal jika hanya dibebankan pada sekolah semata, sementara keluarga dan masyarakat tidak mendukung atau bahkan memberikan contoh yang kontradiktif."

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pembentukan karakter di sekolah sudah relatif baik, dengan berbagai program pembiasaan seperti Jumat bersih, piket kelas, dan penanaman disiplin. Namun, ketika siswa pulang ke rumah, mereka sering menghadapi lingkungan keluarga yang tidak konsisten menerapkan nilai-nilai yang sama. Bahkan lebih parah lagi, di lingkungan masyarakat, siswa sering menyaksikan contoh perilaku tidak bertanggung jawab, seperti membuang sampah sembarangan, yang tidak mendapatkan sanksi sosial. Kondisi ini menimbulkan konflik nilai internal pada diri siswa yang menghambat proses internalisasi (Saadah et al., 2023).

Dari sudut pandang kepala sekolah, temuan ini mengindikasikan perlunya strategi *school-community partnership* yang lebih proaktif. Sekolah tidak bisa hanya mengandalkan orang tua datang ke sekolah, tetapi harus secara aktif menjangkau keluarga dan komunitas (Santoso et al., 2024). Program-program seperti *parenting class*, kunjungan rumah (*home visit*), serta pelibatan tokoh masyarakat dalam kegiatan lingkungan sekolah menjadi rekomendasi konkret yang muncul dari penelitian ini. *Parenting class* dapat dilaksanakan setiap awal semester atau minimal tiga kali dalam satu tahun ajaran, misalnya pada saat pembagian rapor atau hari orang tua. Dalam kegiatan ini, orang tua diajak berdiskusi tentang praktik pembiasaan lingkungan di rumah, menyamakan persepsi tentang disiplin dan tanggung jawab, serta mendapatkan pemahaman bahwa pembentukan karakter tidak cukup hanya di sekolah. Orang tua juga diberi panduan sederhana, misalnya melibatkan anak dalam kegiatan menyiram tanaman, memilah sampah rumah tangga, atau membiasakan mematikan lampu dan air jika tidak digunakan. Kunjungan rumah (*home visit*), di sisi lain, dilakukan oleh guru secara terjadwal, terutama bagi siswa yang menunjukkan ketidakkonsistenan perilaku antara di sekolah dan di rumah. Dalam kunjungan ini, guru berperan sebagai pendengar dan fasilitator komunikasi antara sekolah dan orang tua: guru mengamati kondisi lingkungan belajar anak di rumah, mendengarkan kendala orang tua dalam menanamkan disiplin, serta memberikan saran praktis yang disesuaikan dengan kondisi keluarga, tanpa bersifat menghakimi. Pelibatan tokoh masyarakat, seperti ketua RT/RW, tokoh agama, atau pengurus karang taruna, dapat diwujudkan melalui undangan sebagai narasumber dalam kegiatan sekolah seperti Jumat bersih bersama, lomba lingkungan antar rumah, atau pemberian motivasi dalam upacara bendera tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Tokoh masyarakat juga dapat berperan sebagai pengawas partisipatif di luar jam sekolah, misalnya mengingatkan siswa yang membuang sampah sembarangan di lingkungan sekitar, sehingga terjadi kesinambungan nilai antara sekolah dan masyarakat (Saadah et al., 2023). Penelitian tentang keberhasilan program Adiwiyata juga menegaskan bahwa kolaborasi yang erat antara pihak sekolah, orang tua, dan komunitas sekitar merupakan faktor kunci internalisasi karakter peduli lingkungan (Syahri et al., 2025).

4. Pendekatan Restoratif vs. Punitive: Implikasi terhadap Kualitas Civic Disposition

Temuan kelima mengenai perbedaan pendekatan disiplin antara sekolah memberikan kontribusi teoretis yang signifikan. SD Negeri Katelan 1 yang masih menerapkan pendekatan berbasis hukuman (*punitive approach*) cenderung menghasilkan *civic disposition* yang rapuh dan bergantung pada ancaman eksternal. Sebaliknya, SD Negeri Sigit 2 yang telah mengadopsi pendekatan restoratif (*restorative practice*) menunjukkan kualitas *civic disposition* yang lebih terinternalisasi dan stabil.

Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui teori *environmental citizenship* dari (Dobson, 2007). Dobson secara tegas membedakan dua cara mendisiplinkan warga negara. *Pertama*, pendekatan berbasis kewajiban (*obligation-based*) yang mengandalkan sanksi dan aturan. Pendekatan ini hanya efektif untuk kepatuhan jangka pendek. *Kedua*, pendekatan berbasis kebajikan (*virtue-based*) yang dibangun melalui pendidikan, refleksi moral, dan pemahaman dampak perilaku. Pendekatan ini menghasilkan komitmen internal yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pendekatan restoratif yang diterapkan di SDN Sigit 2 secara jelas mencerminkan pendekatan berbasis kebajikan, siswa diajak untuk mengidentifikasi dampak dari tindakannya, merancang proses perbaikan, dan belajar dari konsekuensi alami. Sebagai contoh, ketika seorang siswa ketahuan membuang sampah sembarangan di halaman sekolah, guru tidak langsung memberikan hukuman membersihkan seluruh halaman sendirian. Sebaliknya, guru mengajak siswa tersebut dan teman-teman sekelasnya duduk dalam lingkaran kecil (lingkaran restoratif) untuk berdialog. Dalam dialog ini, guru berperan sebagai fasilitator yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif, seperti "Apa yang membuat kamu membuang sampah di sini?", "Menurut kamu, bagaimana perasaan petugas kebersihan jika melihat sampah berserakan?", dan "Apa yang bisa kita lakukan bersama agar kejadian ini tidak terulang?". Siswa didorong untuk mengungkapkan perasaannya, mendengarkan pandangan teman-temannya, dan menyadari bahwa tindakannya berdampak pada orang lain dan lingkungan. Selanjutnya, siswa bersama guru dan teman-temannya merancang tindakan perbaikan, misalnya siswa tersebut membuat kesepakatan untuk menjadi "duta kebersihan" selama satu minggu, mengingatkan teman yang membuang sampah sembarangan, dan menulis refleksi singkat tentang pentingnya menjaga lingkungan bersama. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar dari kesalahannya, tetapi juga merasa dilibatkan dalam proses perbaikan, sehingga pemahaman nilai tanggung jawab tumbuh dari kesadaran internal, bukan karena takut hukuman. Temuan ini selaras dengan penelitian Hadjichambis & Reis (2020) tentang *Citizen Science for Environmental Citizenship* (CS4EC), yang menunjukkan bahwa partisipasi aktif siswa dalam proyek-proyek lingkungan dengan pendekatan restoratif lebih efektif dalam membangun *ecological citizenship* yang terinternalisasi dibandingkan pendekatan yang mengandalkan aturan dan hukuman.

Guru-guru di sekolah dengan pendekatan restoratif melaporkan bahwa siswa lebih mampu mentransfer nilai-nilai *ecological citizenship* ke dalam konteks di luar sekolah, karena mereka bertindak berdasarkan pemahaman internal, bukan karena takut hukuman. Seorang guru di SDN Sigit 2 menceritakan bahwa salah satu siswanya secara sukarela memunguti sampah plastik di sekitar rumahnya setiap pagi sebelum berangkat sekolah tanpa diminta orang tua, serta mengingatkan ayahnya untuk tidak membakar sampah sembarangan karena dapat mencemari udara dan membahayakan kesehatan. Guru lain melaporkan bahwa siswa yang sama juga mengajak adiknya untuk menyiram tanaman setiap sore dan menegur teman bermain yang membuang bungkus makanan di selokan. Perilaku-perilaku ini tidak muncul karena ada ancaman hukuman dari sekolah, melainkan tumbuh dari kesadaran internal yang terbentuk melalui diskusi reflektif dan pembiasaan yang konsisten selama program berlangsung. Temuan ini selaras dengan penelitian (Hadjichambis & Reis, 2020) tentang *Citizen Science for Environmental Citizenship* (CS4EC), yang menunjukkan bahwa partisipasi aktif siswa dalam proyek-proyek lingkungan dengan pendekatan restoratif lebih efektif dalam membangun *ecological citizenship* yang terinternalisasi dibandingkan pendekatan yang mengandalkan aturan dan hukuman.

5. Model Tiga Tahap Perkembangan *Civic Disposition* sebagai Moderator

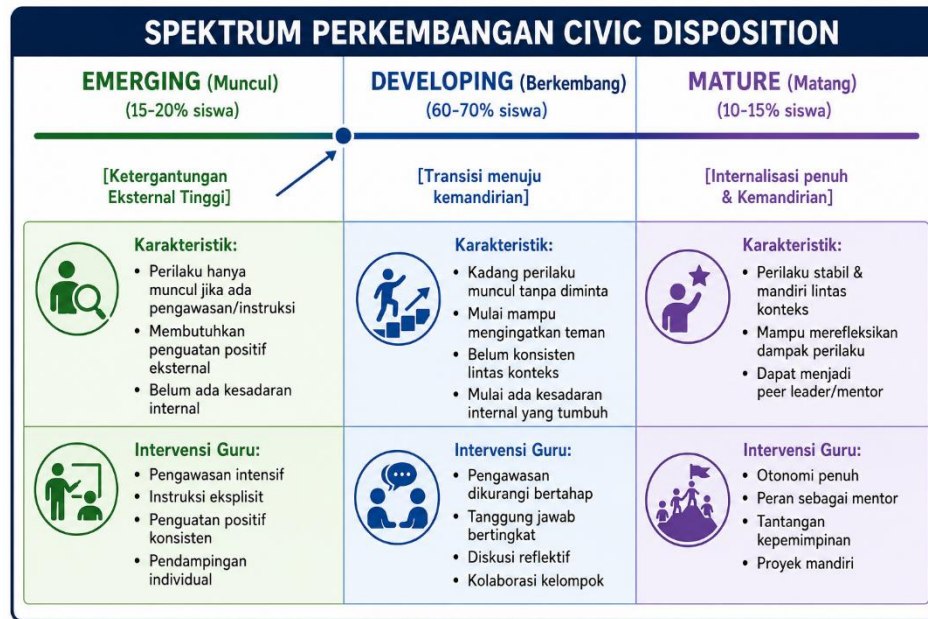
Salah satu kontribusi teoretis paling signifikan dari penelitian ini adalah ditemukannya model tiga tahap perkembangan *civic disposition*. Model ini secara

eksplisit dirumuskan berdasarkan perspektif guru dan kepala sekolah. Ketiga tahap tersebut adalah:

- a. Tahap *emerging* yaitu perilaku bergantung sepenuhnya pada stimulus eksternal,
- b. Tahap *developing* yaitu internalisasi mulai terjadi tetapi belum konsisten lintas konteks,
- c. Tahap *mature* yaitu internalisasi penuh dengan perilaku yang stabil dan mandiri (Weber, 2023).

Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa SD berada pada tahap *developing*, yaitu masa transisi. Pada tahap ini, efek moderasi *civic disposition* terhadap hubungan antara *ecological citizenship* dan hasil belajar memang masih kecil dan lemah. Namun, guru dan kepala sekolah melaporkan bahwa mereka dapat mengidentifikasi indikator-indikator pergerakan siswa dari satu tahap ke tahap berikutnya. Indikator tersebut antara lain: (1) kemunculan perilaku pro-lingkungan tanpa diminta, misalnya seorang siswa secara sukarela memunguti sampah di halaman sekolah saat jam istirahat tanpa ada instruksi dari guru, atau menutup keran air yang masih mengalir di kamar mandi meskipun tidak ada yang melihat; (2) kemampuan mengingatkan teman yang melanggar aturan, misalnya seorang siswa menegur temannya yang hendak membuang bungkus makanan di selokan dengan mengatakan "Jangan di situ, nanti selokannya mampet dan banjir, buang ke tempat sampah saja"; (3) konsistensi perilaku baik saat diawasi maupun tidak diawasi, misalnya siswa tetap menjaga kebersihan area piketnya ketika guru sedang berada di dalam ruang guru atau tidak sedang memantau, tidak hanya rajin saat ada pengawasan dari guru atau petugas sekolah; serta (4) kemampuan merefleksikan dampak perilaku terhadap orang lain dan lingkungan, misalnya seorang siswa mampu menjelaskan bahwa membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan banjir dan menyusahkan petugas kebersihan, atau bahwa menghemat air berarti membantu tetangga yang kekurangan air bersih, yang diungkapkan dalam diskusi kelas atau jurnal refleksi mingguan.

Model tiga tahap ini memiliki implikasi praktis yang sangat kuat. Guru dapat melakukan asesmen diagnostik untuk menentukan posisi setiap siswa dalam tahap perkembangan *civic disposition* mereka. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, guru kemudian merancang intervensi yang bersifat *scaffolding* diantaranya siswa pada tahap *emerging* membutuhkan pengawasan eksternal yang lebih intensif dan sistem penguatan positif yang jelas, siswa pada tahap *developing* membutuhkan pengawasan yang berkurang secara bertahap serta kesempatan untuk mengambil tanggung jawab, sementara siswa pada tahap *mature* dapat diberikan peran sebagai *peer leader* atau mentor.

Gambar 2. Spektrum Perkembangan *Civic Disposition*

Gambar 2 menyajikan spektrum perkembangan *civic disposition* yang lebih terperinci, menggambarkan rentang pergerakan siswa dari ketergantungan eksternal menuju kemandirian internal. Spektrum ini menunjukkan bahwa pada tahap *emerging*, siswa membutuhkan pengawasan eksternal yang intensif dan sistem penguatan positif yang jelas. Memasuki tahap *developing*, siswa mulai menunjukkan perilaku pro lingkungan tanpa diminta, kemampuan mengingatkan teman yang melanggar aturan, dan konsistensi perilaku baik saat diawasi maupun tidak. Pada tahap *mature*, siswa telah mencapai kemandirian penuh dengan perilaku yang stabil lintas konteks, kemampuan merefleksikan dampak perilaku, dan dapat berperan sebagai *peer leader* atau mentor bagi teman-temannya.

Sebagaimana disajikan pada Gambar 3, model ini menggambarkan tiga tahapan perkembangan *civic disposition* dengan temuan empiris sebagai berikut. Pertama, tahap *emerging* (kemunculan awal) ditemukan pada sekitar 35% siswa di ketiga sekolah. Pada tahap ini, perilaku pro-lingkungan siswa seperti membuang sampah pada tempatnya atau menghemat air, hanya muncul ketika ada instruksi langsung dari guru, pengawasan petugas sekolah, atau imbalan seperti bintang penghargaan. Misalnya, seorang siswa di SDN Katelan 1 baru membersihkan meja belajarnya ketika guru secara spesifik menunjuk dan memintanya, dan ia tidak melakukannya secara mandiri saat guru tidak berada di kelas. Guru pada tahap ini berperan sebagai pengawas aktif dengan memberikan instruksi eksplisit dan penguatan positif (pujian atau stiker) setiap kali siswa menunjukkan perilaku yang diharapkan. Siswa belum memiliki kesadaran internal; kepatuhan mereka bersifat situasional dan bergantung pada kehadiran otoritas eksternal. Kedua, tahap *developing* (berkembang) sebagai masa transisi, teridentifikasi pada mayoritas siswa (sekitar 50%) di SDN Sigit 2 dan SDN Sigit 3. Pada tahap ini, internalisasi nilai mulai terjadi, tetapi belum konsisten lintas konteks. Siswa kadang menunjukkan perilaku pro-lingkungan tanpa diminta, tetapi tidak selalu. Contohnya, seorang siswa di SDN Sigit 2 secara sukarela mengingatkan temannya untuk tidak membuang sampah di lantai saat guru sedang tidak di kelas, namun pada kesempatan lain, siswa yang sama lupa mematikan keran air setelah mencuci tangan. Guru pada tahap ini mulai mengurangi pengawasan secara bertahap dan memberikan kepercayaan melalui sistem penanggung jawab harian bergilir. Siswa mulai dilibatkan dalam diskusi

reflektif tentang alasan pentingnya menjaga lingkungan, serta diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan sederhana, seperti menentukan jadwal piket kelompok secara mandiri. Ketiga, tahap *mature* (matang), ditemukan pada sekitar 15% siswa, terutama di SDN Sigit 2 yang menerapkan pendekatan restoratif secara konsisten. Pada tahap ini, siswa menunjukkan perilaku pro-lingkungan yang stabil dan mandiri lintas konteks (sekolah, rumah, dan masyarakat). Contohnya, seorang siswa secara teratur memunguti sampah di lingkungan sekolah meskipun tidak ada guru yang melihat, mengingatkan orang tua untuk tidak membakar sampah di rumah, dan mampu menjelaskan dalam diskusi kelas bahwa perilaku hemat air berdampak pada ketersediaan air bagi tetangga. Guru pada tahap ini memberikan otonomi penuh, menjadikan siswa sebagai peer leader atau mentor bagi teman-temannya, dan memberikan tantangan kepemimpinan lingkungan seperti mengkoordinasi kegiatan Jumat bersih atau menjadi duta Adiwiyata bagi kelasnya. Dengan demikian, para guru dan kepala sekolah dalam penelitian ini mengidentifikasi bahwa mayoritas siswa SD (sekitar 50%) berada pada tahap *developing*, yang menjelaskan mengapa efek moderasi *civic disposition* masih tergolong kecil dan lemah.



Gambar 3. Model Perkembangan Civic Disposition

Sebagaimana disajikan pada Gambar 3, model ini menggambarkan tiga tahapan perkembangan civic disposition dengan temuan empiris sebagai berikut. Pertama, tahap *emerging* (kemunculan awal) ditemukan pada sekitar 35% siswa di ketiga sekolah. Pada tahap ini, perilaku pro-lingkungan siswa seperti membuang sampah pada tempatnya atau menghemat air hanya muncul ketika ada instruksi langsung dari guru, pengawasan petugas sekolah, atau imbalan seperti bintang penghargaan. Misalnya, seorang siswa di SDN Katelan 1 baru membersihkan meja belajarnya ketika guru secara spesifik menunjuk dan memintanya, dan ia tidak melakukannya secara mandiri saat guru tidak berada di kelas. Guru pada tahap ini berperan sebagai pengawas aktif dengan memberikan instruksi eksplisit dan penguatan positif (pujian atau stiker) setiap kali siswa menunjukkan perilaku yang diharapkan. Siswa belum memiliki kesadaran internal; kepatuhan mereka bersifat situasional dan bergantung pada kehadiran otoritas eksternal. Kedua, tahap *developing* (berkembang) teridentifikasi pada mayoritas siswa (sekitar 50%) di SDN Sigit 2 dan SDN Sigit 3. Pada tahap ini, internalisasi nilai mulai terjadi, tetapi belum konsisten lintas konteks. Siswa kadang menunjukkan perilaku pro-lingkungan tanpa diminta, tetapi tidak selalu. Contohnya, seorang siswa di SDN Sigit 2 secara sukarela mengingatkan temannya untuk tidak membuang sampah di lantai saat guru sedang tidak di kelas, namun pada kesempatan lain, siswa yang sama lupa mematikan keran air setelah mencuci tangan. Guru pada tahap ini mulai mengurangi pengawasan secara bertahap dan memberikan kepercayaan melalui sistem

penanggung jawab harian bergilir. Siswa mulai dilibatkan dalam diskusi reflektif tentang alasan pentingnya menjaga lingkungan, serta diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan sederhana, seperti menentukan jadwal piket kelompok secara mandiri. Ketiga, tahap mature (matang) ditemukan pada sekitar 15% siswa, terutama di SDN Sigit 2 yang menerapkan pendekatan restoratif secara konsisten. Pada tahap ini, siswa menunjukkan perilaku pro-lingkungan yang stabil dan mandiri lintas konteks (sekolah, rumah, dan masyarakat). Contohnya, seorang siswa secara teratur memunguti sampah di lingkungan sekolah meskipun tidak ada guru yang melihat, mengingatkan orang tua untuk tidak membakar sampah di rumah, dan mampu menjelaskan dalam diskusi kelas bahwa perilaku hemat air berdampak pada ketersediaan air bagi tetangga. Guru pada tahap ini memberikan otonomi penuh, menjadikan siswa sebagai peer leader atau mentor bagi teman-temannya, dan memberikan tantangan kepemimpinan lingkungan seperti mengoordinasi kegiatan Jumat bersih atau menjadi duta Adiwiyata bagi kelasnya. Dengan demikian, para guru dan kepala sekolah dalam penelitian ini mengidentifikasi bahwa mayoritas siswa SD (sekitar 50%) berada pada tahap developing, yang menjelaskan mengapa efek moderasi civic disposition masih tergolong kecil dan lemah.

6. Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Menciptakan Ekosistem Karakter

Pembahasan tidak lengkap tanpa menyoroti peran krusial kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kualitas *civic disposition* antar sekolah tidak terlepas dari gaya kepemimpinan dan kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah. Kepala sekolah di SDN Sigit 2, misalnya, secara aktif membangun budaya akuntabilitas melalui pendekatan restoratif, melibatkan guru dalam pengambilan keputusan, serta menjalin kemitraan dengan orang tua dan komunitas. Penerapan pendekatan restoratif di SDN Sigit 2 diwujudkan melalui kebijakan kepala sekolah yang mewajibkan guru mengadakan 'lingkaran restoratif' (*restorative circle*) setiap kali terjadi pelanggaran ringan, seperti membuang sampah sembarangan atau datang terlambat, serta mengadakan refleksi bersama setiap akhir pekan untuk mengevaluasi dinamika perilaku siswa dan merancang tindak lanjut perbaikan. Dalam hal pengambilan keputusan, kepala sekolah secara rutin menggelar forum musyawarah guru (MGMP internal) setiap awal bulan untuk menyusun kebijakan sekolah, seperti kesepakatan sistem penghargaan berbasis proses, mekanisme penanganan pelanggaran, dan penetapan program lingkungan semesteran, sehingga guru merasa memiliki tanggung jawab kolektif dan tidak hanya menjalankan instruksi sepihak. Sementara itu, kemitraan dengan orang tua dan komunitas diwujudkan melalui program 'Sapa Warga' yang dilakukan setiap bulan, di mana kepala sekolah bersama guru mengunjungi orang tua siswa dan tokoh masyarakat setempat untuk mensosialisasikan program lingkungan sekolah, mendengarkan keluhan dan masukan orang tua tentang kesulitan pembiasaan di rumah, serta mengundang tokoh masyarakat (misalnya ketua RT dan tokoh agama) menjadi narasumber dalam kegiatan lingkungan sekolah, seperti menjadi juri lomba kebersihan antar kelas atau memberi motivasi dalam kegiatan Jumat bersih setiap satu semester sekali. Sebaliknya, kepala sekolah di SDN Katelan 1 cenderung masih menggunakan pendekatan *top-down* dan berbasis sanksi.

Hal ini sejalan dengan teori kepemimpinan transformasional yang menyatakan bahwa kepala sekolah yang efektif mampu menginspirasi, memotivasi, dan memberdayakan seluruh komunitas sekolah untuk mencapai visi bersama (Hou et al., 2025). Kepala sekolah tidak cukup hanya sebagai administrator yang menjalankan aturan. Ia harus menjadi agen perubahan yang visioner dalam membangun ekosistem karakter (Sahertian & Effend, 2022). Rekomendasi konkret yang muncul adalah perlunya penguatan kapasitas kepala sekolah melalui pelatihan kepemimpinan karakter, pendampingan implementasi pendekatan restoratif, serta pengembangan jejaring kemitraan dengan orang tua dan komunitas (Sapitri & Purwanto, 2025).

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa guru dan kepala sekolah memiliki peran yang tidak tergantikan dalam menumbuhkan *civic disposition* melalui *ecological citizenship* di SD. Meskipun efek moderasi yang dihasilkan masih kecil dan lemah karena posisi perkembangan siswa yang berada pada tahap transisi (*developing*), para pendidik telah menunjukkan berbagai strategi adaptif untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Lima faktor penghambat yang teridentifikasi diantaranya ketergantungan pada pengawasan eksternal, variabilitas antar siswa, durasi intervensi yang pendek, ketiadaan kesinambungan tri pusat pendidikan, serta pendekatan disiplin berbasis hukuman dengan memberikan peta jalan yang jelas bagi perbaikan kebijakan dan praktik di masa depan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa guru dan kepala sekolah memiliki peran sentral dalam menumbuhkan *civic disposition* melalui *ecological citizenship* di SD, namun efek moderasinya masih kecil dan lemah. Hal ini disebabkan karena *civic disposition* siswa secara umum berada pada tahap *developing* atau masa transisi antara ketergantungan stimulus eksternal menuju internalisasi penuh. Lima faktor penghambat utama teridentifikasi ialah ketergantungan pada pengawasan eksternal, variabilitas antar siswa tinggi, durasi intervensi empat minggu tidak memadai, ketiadaan kesinambungan tri pusat pendidikan (sekolah, keluarga, masyarakat), serta pendekatan disiplin berbasis hukuman (*punitive*).

Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya program penguatan *civic disposition* dengan durasi minimal satu semester, transisi menuju pendekatan restoratif (*restorative practice*), penerapan pendekatan berdiferensiasi berdasarkan tingkat disposisi siswa, serta penguatan kemitraan dengan orang tua dan komunitas. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya adalah melakukan penelitian longitudinal minimal satu tahun ajaran, melibatkan siswa sebagai informan langsung, menggunakan multiple raters dari orang tua dan teman sebaya, serta menguji validitas model tiga tahap perkembangan *civic disposition* yaitu tahap *emerging*, *developing*, dan *mature* melalui penelitian lintas jenjang pendidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), atas dukungan pendanaan penuh yang diberikan bagi penelitian ini melalui skema Penelitian Pasca Magister dengan nomor kontrak induk 263/C3/DT.05.00/PL-BARU/2026. Penulis juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak serta para informan yang telah berkontribusi dalam proses pengumpulan data di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduloh. (2018). Character education based on six value system. *SHS Web of Conferences*, 42, 00055. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20184200055>
- Amini, M. Z., Prasetyo, W. H., & Gunarsi, S. (2022). Civic Disposition Based on Ecological Citizenship: A Case Study at SMP Negeri 1 Wirosari. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 7(3), 373–382. <https://doi.org/10.26618/jed.v7i3.7906>
- Anisafitri, A. (2021). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Perilaku Penggunaan Alat Pelindung Diri (Apd) Pada Pekerja Di Pabrik Roti Ud. Fajar Jaya Magetan. *Jurnal Surya Medika*, 7(1), 48–55
- Anshory, M. U., Triyanto, & Tarsidi, D. Z. (2025). *The Effect Ecological Citizenship on Critical Thinking Skills of Elementary School Student*. 8(4), 167–186.

- Baxter, P., & Jack, S. (2015). Qualitative Case Study Methodology: Study Design and Implementation for Novice Researchers. *The Qualitative Report*, 13(4), 544–559. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2008.1573>
- Berkowitz, M. W. (2011). What works in values education. *International Journal of Educational Research*, 50(3), 153–158. <https://doi.org/10.1016/j.ijer.2011.07.003>
- Budiyono, (2017). Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan. UPT UNS Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). FIFTH EDITION RESEARCH DESIGN. In *European University Institute* (Number fifth edition). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=PT%0Ahttp://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012PC0011:pt:NOT>
- Dobson, A. (2007). Environmental citizenship: Towards sustainable development. *Sustainable Development*, 15(5), 276–285. <https://doi.org/10.1002/sd.344>
- Dobson, A. (2003). *CITIZENSHIP AND THE ENVIRONMENT ANDREW DOBSON (FIRST)*. OXFORD UNIVERSITY PRESS
- Dweck, C. (2016). *Fixed vs. Growth: The Two Basic Mindsets That Shape Our Lives*. 1–12.
- Feriandi, Y. A., Budimansyah, D., & Komalasari, K. (2021). Studies on the Ecological Competence of Civic Education in Primary Schools. *Madrasah: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, 13(2), 173–185. <https://doi.org/10.18860/mad.v13i2.12291>
- Hadjichambis, A., & Reis, P. (2020). Environmental Citizenship in the Context of Environmental Education and Education for Sustainability. In *Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education* (Vol. 4, Number January). <http://link.springer.com/10.1007/978-3-030-20249-1>
- Hou, M., Ahmad, J. B., & Zhao, Y. (2025). The Practice of Transformational Leadership in K12 Private Schools in China: Strategies and Insights for Driving Educational Innovation. *Research in Educational Administration and Leadership*, 10(1), 89–131. <https://doi.org/10.30828/real.1566630>
- Hulu, J. R., & Bawamenewi, A. (2022). Strategi Guru Menanamkan Civic Skills Siswa Pada Pembelajaran PKn. *Educativo: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 263–270. <https://doi.org/10.56248/educativo.v1i1.36>
- Jusniar Dwiputri, L., Husen, A., Purwandari, D. A., Nabilla, Z., & Dwiana, B. D. (2025). Fostering Environmental Culture Through Transformational Leadership and Teachers' OCB. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 6(7), 1388–1396. <https://doi.org/10.59141/jist.v6i7.9083>
- Komalasari, K. (2009). The Effect of Contextual Learning in Civic Education on Students' Civic Competence. *Journal of Social Sciences*, 5(4), 261–270. <https://doi.org/10.3844/jssp.2009.261.270>
- Nabavi, R. T., & Bijandi, M. S. (2024). A Literature Review on Bandura's Social Learning Theory & Social Cognitive Learning Theory. *Ministry of Science, Research and Technology*, (December), 1–23. <https://www.researchgate.net/publication/267750204>
- Pangalila, T. (2017). *Peningkatan civic disposition siswa melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)*. 7, 91–103. <http://repository.unima.ac.id:8080/handle/123456789/426>
- Piaget, J., & D.C, P. (2015). THEORY AND PHILOSOPHY. *ENCYCLOPEDIA OF EDUCATIONAL*, 2(October), 623–628.
- Pratama, E. D., Patmisari, P., & Muthali'in, A. (2023). STRATEGI GURU DALAM MENGEMBANGKAN KETERAMPILAN KEWARGANEGARAAN (CIVIC SKILLS) SISWA. *Academy of Education Journal*, 14(2), 245–255. <https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.1642>
- Saadah, L., Rusnaini, R., & Muchtarom, M. (2023). The internalization of school

- environmental care through Adiwiyata program. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 20(2), 205–213. <https://doi.org/10.21831/jc.v20i2.56549>
- Sahertian, P., & Effend, Y. R. (2022). Effectiveness of Clarity Learning Model to Improve Students' Advanced Clarification Critical Thinking Ability in Physics Courses. *Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi*, 12(3), 49–58. <https://doi.org/10.47750/pegegog.12.03.07>
- Santoso, R. (2024). *Optimalisasi Pendidikan Karakter Melalui Sinergitas Tripusat Pendidikan Pendahuluan*. 14–28.
- Santoso, R., Khotimah, K., Opeska, Y., Sasih, A. W., & Dewi, N. (2024). Pendidikan Kewarganegaraan Berkelanjutan di Indonesia Ekologis Sebagai Upaya Pembangunan. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 8–15.
- Sapitri, R., & Purwanto, N. A. (2025). *The Role of Principal Transformational Leadership in Encouraging Teaching Innovation of Elementary School Teachers*. 22(3), 137–144. <https://doi.org/10.17509/jap.v22i2.92507>
- Sembiring, T., Ramadhani, K. N., Yunita, S., Jamaludin, J., & Sihaloho, O. A. (2024). Strategi Inovatif Guru PPKn Dalam Meningkatkan Civic Disposition Siswa. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 2(2), 85–94. <https://multi.risetakademik.com/index.php/jim/article/view/17>
- Stake, R. E. (2014). MULTIPLE CASE STUDY ANALYSIS. In *Computational Methods and Function Theory* (Vol. 14, Numbers 2–3). <https://doi.org/10.1007/s40315-013-0039-6>
- Syahri, M., Wibowo, A. P., Widodo, R., Putri, S., Sari, W., & Bestari, P. (2025). *Ecological citizenship education: upaya SMP Negeri 3 Kota Malang sebagai sekolah Adiwiyata dalam mengembangkan sikap peduli lingkungan*. 10(1), 14–23. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jurnalcivichukum>
- Weber, P. S. (2023). Character formation and emerging adulthood. *Stellenbosch Theological Journal*, 9(2), 1–24. <https://doi.org/10.17570/stj.2023.v9n2.a4>